

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hendrizar

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Policy Implementation Public Information Services. This study aims to determine the implementation of the policy of public information services in Siak. This type of research is qualitative research. While the research informants include environment officials of Department of Transportation and Communication Equipment Siak, NGOs, students and people who need the information. Data collection technique were interview, observation and documentation. Data were analyzed using qualitative descriptive manner, which explains the argument any information and data obtained from the research informants. The results showed that the implementation of the policy of public information service has not done well, mainly due to the communication of information policy is not properly socialized. Constraints faced by Siak district government in realizing public disclosure caused by factors relating to human resources, financial, and facilities management.

Keywords: policy implementation services, public information, openness

Abstrak: Implementasi Kebijakan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan layanan informasi publik di Kabupaten Siak. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Sedangkan informan penelitian meliputi Pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, LSM, mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan secara argumentasi setiap informasi dan data yang diperoleh dari informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan informasi publik belum terlaksana dengan baik, terutama disebabkan komunikasi informasi kebijakan belum tersosialisasi dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik disebabkan oleh faktor yang menyangkut sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan manajemen.

Kata kunci: implementasi kebijakan layanan, informasi publik, keterbukaan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah mengamanahkan bagi setiap pemerintah daerah sebagai badan publik sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebaagian atau

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Amanah dari undang-undang tersebut, wajib dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Siak, untuk membantu Sekretariat Komisi Informasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi “Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang

dibidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan”.

Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai petunjuk teknis dan petunjuk laksana bagi setiap pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Sekretariat Komisi Informasi, yang bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, kemudian menyampaikan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkannya.

Pembentukan Sekretariat PPID (Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi) di setiap Kabupaten, merupakan bagian dari perwujudan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Namun hingga saat ini Sekretariat PPID belum tersedia di Kabupaten Siak. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah hampir 5 (lima) tahun berjalan, namun belum terlaksana dengan baik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Informasi merupakan kebutuhan hidup manusia, yang dapat memberikan berbagai keterangan yang dibutuhkan setiap orang baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Tata Sutabri (2005), informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kualitas informasi tergantung pada: 1). Akurat; bebas dari kesalahan dan tidak bias, 2). Tepat waktu; informasi yang pada sisi penerima tidak boleh terlambat, 3). Relevan; informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakai. Pelayanan keterbukaan informasi publik yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 adalah merupakan suatu kebijakan publik. Menurut Edwar III dalam Dwiyanto (2009), bahwa ada empat variabel

yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak dan kendala-kendala yang mempengaruhinya.

METODE

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah pegawai yang mengelola informasi pada Dinas Perhubungan dan Infokom, penggunaan informasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, metode deskriptif yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan observasi dan analisis data primer yang lengkap sekaligus dikontrol dengan data sekunder.

HASIL

Komunikasi

Komunikasi tersebut meliputi; sosialisasi yang merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menjadikan suatu proses belajar bagi setiap orang untuk memahami kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak, belum berjalan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait, belum menunjukkan adanya sosialisasi yang lebih monoton dan berkesinambungan, sehingga komunikasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi hanya sebatas pemberitahuan melalui media on-line yang tentang

portal Kabupaten Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak sudah berupaya untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Namun masih belum terdapat satu atap dalam menyebarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi ini belum menunjukkan adanya pelayanan khusus dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang membutuhkannya, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat masih terpecah diberbagai instansi.

Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Hal ini dimaksudkan adanya keselarasan dari sumber daya manusia dan dana yang mencukupi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya dana atau finansial

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Sumber daya manusia disini diaksud adalah tersedianya orang-orang yang mampu memberikan pelayanan terhadap informasi publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan operasional dan kemampuan manajerial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak

Kemudian sumber daya tersebut juga didukung oleh sumber daya dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan implementasi peraturan tersebut. pemerintah Kabupaten Siak sudah menganggarkan dalam APBD Kabupaten Siak tahun 2014 untuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Berdasarkan observasi peneliti pada Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, dimana alokasi anggaran tersebut kebanyakan untuk menyediakan ruang untuk PPID beserta staf dan jajarannya serta untuk biaya pelatihan-pelatihan saja, namun anggaran khusus dalam mengumpulkan berbagai data dari seluruh SKPD belum tampak dalam alokasi anggaran tersebut, sehingga data yang dibutuhkan masyarakat masih terpecah pada Dinas, Badan Kantor dan unit teknis lainnya

Disposisi

Selanjutnya salah satu pendukung dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Disposisi tersebut menyangkut kejujuran, komitmen dan sikap demokratis dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Kabupaten Siak. Kesemua indikator disposisi tersebut sudah dijalankan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak.

Disposisi tersebut menyangkut, Kejujuran merupakan salah satu pendukung disposisi kebijakan, karena kejujuran akan melahirkan sikap nilai dan karakteristik yang melekat pada diri individu. Selanjutnya, Komitmen secara sederhana dapat dikatakan sebagai ketaatan terhadap aturan yang sudah ada. Komitmen disini dimaksudkan bagaimana menanamkan kepatuhan

dan ketaatan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Kemudian Demokrasi menyangkut adanya sikap saling terbuka antara bawahan dengan atasan, sehingga terjadi komunikasi dua arah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ditetapkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi setiap organisasi, khususnya organisasi pemerintahan. Menurut David Beentham dalam Thoha (2007) mengatakan bahwa ada tiga elemen pokok dalam birokrasi, *pertama*, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis, *kedua*, birokrasi dipandang sebagai kekuatan independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang melekat pada penerapan fungsi sebagai instrumen teknis tersebut, dan *ketiga*, pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular.

Struktur birokrasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi sudah dilimpahkan oleh Bupati Siak kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Siak. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak

Kendala-kendala dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik

Kendala yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 adalah:

- 1). Belum tersedianya tenaga sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam menghimpun, menyusun dan menyampaikan berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Siak,

- 2). Anggaran yang khusus untuk pembentukan dan pengurusan sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Siak, belum tersedia secara maksimal. Anggaran yang digunakan masih bergabung dengan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, yang membidangi tentang informasi dan komunikasi di Kabupaten Siak, 3). Fasilitas yang ada pada Sekretraiat PPID Kabupaten Siak, masih relatif kurang dan belum tersedia dengan baik. Pengamatan peneliti pada Sekretariat PPID yang berada pada Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, masih terdapat berbagai kekurangan, seperti komputerisasi yang belum lengkap, meja administrasi yang belum tersedia, ruang tunggu masyarakat dan fasilitas lain yang mendukung belum juga tampak tersedia dan 4). Belum jelasnya kewenangan dalam melaksanakan keterbukaan informasi bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selama ini informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat masih terpecah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan publik yang pertama dibutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif dan efisien antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Komunikasi disini dimaksud adalah terjalannya komunikasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan masyarakat yang mbutuhkan berbagai informasi. Hal ini senada dengan konsep yang dikemukakan oleh Berger dalam Sunarto (2004) mengatakan bahwa sosialisasi sebagai proses melalui seseorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.

Selanjutnya komunikasi dapat dilakukan melalui informasi mempunyai peranan penting dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kepada penerima informasi, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemberi informasi dengan penerima informasi. Informasi menurut Widjaja (2002) yang mengatakan bahwa informasi adalah suatu usaha untuk memberikan penerangan atau pemberitahuan tentang suatu kabar atau berita. Informasi juga disebut sebagai pesan, pesan terjadi disebabkan adanya penyampaian pesan. Terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara pesan dengan penerima pesan.

Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau, sudah berupaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi untuk publik di Kabupaten Siak. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi publik sebagaimana yang ditetapkan juga dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 391 ayat (1) yang berbunyi "Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas; a) informasi Pembangunan Daerah dan informasi Keuangan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 395 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi "selain informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 391 ayat (1) pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintah daerah lainnya". Keterbukaan informasi publik menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, hal ini merupakan amanat dari semangat reformasi dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang transparansi, akuntabel dan terbebas dari praktek pemerintah yang korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun dari hasil penelitian yang diperoleh dari pelaksana-

naan keterbukaan informasi tersebut belum terwujud secara optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terutama adalah manusia pelaksanaan kebijakan. Menurut Isyandi (2004) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia atau biasa disebut tenaga kerja, baik secara individu maupun kelompoknya selalu mempunyai sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memunculkan perilaku berlainan. Perbedaan perilaku tersebut biasanya dicerminkan pada saat individu tersebut atau kelompok manusia bekerja melaksanakan aktivitasnya. Artinya bahwa sikap dan tingkah laku manusia akan dapat dilihat dalam kesungguhannya menjalankan pekerjaan dan cara bekerja seseorang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian-pencapaian tujuan organisasi.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan layanan informasi publik, belum terlaksana dengan baik, disebabkan informasi kebijakan layanan tersosialisasi secara maksimal pada objek kebijakan. Komunikasi yang dilakukan selama ini masih bersifat komunikasi yang belum tertata dalam satu atap, dimana masyarakat yang membutuhkan informasi, masih berkomunikasi dengan SKPD yang sesuai dengan kebutuhan informasi tersebut. Sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik juga belum tersedia secara optimal dalam meaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Disposisi, menyangkut kejujuran, komitmen dan demokrasi begi setiap elemen yang ada pada Sekretariat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Siak, masih belum tersedia dengan baik yang dapat memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Kabupaten Siak.

Struktur Birokrasi dalam mewujudkan efektivitas pelayanan publik pada kewenangan yang belum tertata dengan baik dalam mengumpulkan berbagai informasi dari setiap satuan kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Siak disebabkan oleh faktor yang menyangkut sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan manajemen.

DAFTAR RUJUKAN

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media
- Isyandi, B. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global*. Pekanbaru: Unri Press.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tata Sutabri. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara.